



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Camat adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak Daerah.
11. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari hasil Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan asas:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. efektif;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Anggaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Alokasi BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh setiap Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan:
 - a. 87.5% (delapan puluh tujuh koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan hasil PBB-P2 buku I dan buku II; dan
 - b. 12.5% (dua belas koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan jenis Pajak Daerah lainnya selain PBB-P2.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua Desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Besaran BHPD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPD Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHPD}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{BHPD Proporsional Desa}_x = \text{Pagu BHPD Proporsional (40\%)} \times \left[\frac{87.5\% \times \text{realisasi penerimaan PBB-P2 Desa}_x}{\text{total penerimaan PBB-P2 di Daerah} + (12.5\% \times \text{realisasi penerimaan Pajak Daerah Desa}_x \text{ yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah})} \right]$$

$$\text{BHPD Desa}_x = \text{BHPD Merata Desa}_x + \text{BHPD Proporsional Desa}_x$$

- (2) Besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHRD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Desa masing-masing tahun sebelumnya.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan berdasarkan rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah dari setiap perangkat daerah.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua Desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Besaran BHRD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHRD Merata Desa}_x &= \frac{60\% \text{ BHRD}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}} \\ \text{BHRD Proporsional Desa}_x &= \frac{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Desa}_x}{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 40\% \text{ BHRD} \\ \text{BHRD Desa}_x &= \text{BHRD Merata Desa}_x + \text{BHRD Proporsional Desa}_x \end{aligned}$$

- (2) Besaran BHRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan BHPD dan BHRD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD yang ditandatangani oleh perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD;
 - c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat dan tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - d. Kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

BAB V
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan besaran sesuai perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah, badan pendapatan daerah, DPMD dan Desa dengan besaran 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu anggaran.

- (3) Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I (satu) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan BHPD dan BHRD;
 - c. laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD tahun sebelumnya;
 - d. rencana penggunaan anggaran yang akan direalisasikan; dan
 - e. bukti penerimaan penyaluran bermaterai.
- (3) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD untuk tahap II (dua) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi anggaran sampai dengan bulan sebelumnya;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - d. laporan pemotongan dan penyetoran pajak;
 - e. rencana penggunaan anggaran yang akan direalisasikan; dan
 - f. bukti penerimaan penyaluran bermaterai.
- (4) Camat memerintahkan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan, dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi penyaluran ADD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 - c. dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.

Namun apabila ajuan dari Desa masih ada kekurangan, maka dokumen dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk diperbaiki.

- (5) DPMD melakukan penelitian permohonan penyaluran BHPD dan BHRD serta kelengkapan persyaratan administrasinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), untuk disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta kelengkapan persyaratannya.
- (6) Proses pencairan BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Desa pada semester yang bersangkutan.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran BHPD dan BHRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan BHPD dan BHRD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal:
 - a. pengalokasian;
 - b. penyaluran; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan desa tentang penetapan APB Desa; dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan BHPD dan BHRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran BHPD dan BHRD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana BHPD dan BHRD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. Camat tingkat Kecamatan.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana BHPD dan BHRD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BHPD dan BHRD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 19

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa, Desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat BHPD dan BHRD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban Desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya Desa baru hasil pemekaran berhak mendapat BHPD dan BHRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KECAMATAN | DESA | BAGIAN HASIL PAJAK (Rp) | BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp) |
|----|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | BATUJAJAR | BATUJAJAR BARAT | 441.872.000 | 9.962.900 |
| 2 | BATUJAJAR | BATUJAJAR TIMUR | 622.731.100 | 8.646.700 |
| 3 | BATUJAJAR | CANGKORAH | 349.687.800 | 13.332.500 |
| 4 | BATUJAJAR | GALANGGANG | 419.134.100 | 7.040.900 |
| 5 | BATUJAJAR | GIRIASIH | 404.687.400 | 53.594.800 |
| 6 | BATUJAJAR | PANGAUBAN | 427.015.500 | 16.370.000 |
| 7 | BATUJAJAR | SELACAU | 307.475.800 | 12.416.400 |
| 8 | CIHAMPELAS | CIHAMPELAS | 350.479.700 | 8.430.700 |
| 9 | CIHAMPELAS | CIPATIK | 397.472.500 | 17.630.600 |
| 10 | CIHAMPELAS | CITAPEN | 457.156.500 | 12.383.300 |
| 11 | CIHAMPELAS | MEKARJAYA | 335.551.700 | 5.378.000 |
| 12 | CIHAMPELAS | MEKARMUKTI | 321.585.600 | 6.113.300 |
| 13 | CIHAMPELAS | PATARUMAN | 482.539.400 | 32.500.800 |
| 14 | CIHAMPELAS | SINGAJAYA | 349.488.100 | 8.259.800 |
| 15 | CIHAMPELAS | SITUWANGI | 292.454.500 | 5.378.000 |
| 16 | CIHAMPELAS | TANJUNGGAYA | 249.718.400 | 5.378.000 |
| 17 | CIHAMPELAS | TANJUNGWANGI | 323.927.200 | 5.885.800 |
| 18 | CIKALONGWETAN | CIKALONG | 330.906.900 | 10.424.200 |
| 19 | CIKALONGWETAN | CIPADA | 273.125.700 | 5.613.400 |
| 20 | CIKALONGWETAN | CIPTAGUMATI | 276.600.900 | 6.111.600 |
| 21 | CIKALONGWETAN | CISOMANGBARAT | 260.523.900 | 5.378.000 |
| 22 | CIKALONGWETAN | GANJARSARI | 240.870.700 | 10.128.800 |
| 23 | CIKALONGWETAN | KANANGASARI | 254.562.300 | 5.378.000 |
| 24 | CIKALONGWETAN | MANDALAMUKTI | 338.779.500 | 7.242.600 |
| 25 | CIKALONGWETAN | MANDALASARI | 279.406.100 | 7.035.700 |
| 26 | CIKALONGWETAN | MEKARJAYA | 330.140.100 | 5.742.900 |
| 27 | CIKALONGWETAN | PUTERAN | 284.988.200 | 6.194.700 |
| 28 | CIKALONGWETAN | RENDE | 328.224.700 | 9.722.600 |
| 29 | CIKALONGWETAN | TENJOLAUT | 310.575.800 | 5.378.000 |
| 30 | CIKALONGWETAN | WANGUNJAYA | 310.263.000 | 5.582.500 |

| NO | KECAMATAN | DESA | BAGIAN HASIL PAJAK (Rp) | BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp) |
|----|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 31 | CILILIN | BATULAYANG | 291.471.600 | 5.878.600 |
| 32 | CILILIN | BONGAS | 236.743.200 | 5.787.700 |
| 33 | CILILIN | BUDIHARJA | 238.809.000 | 5.378.000 |
| 34 | CILILIN | CILILIN | 310.796.400 | 18.679.100 |
| 35 | CILILIN | KARANGANYAR | 263.819.500 | 7.237.700 |
| 36 | CILILIN | KARANGTANJUNG | 295.265.900 | 15.157.400 |
| 37 | CILILIN | KARYAMUKTI | 244.964.000 | 5.415.600 |
| 38 | CILILIN | KIDANGPANANJUNG | 238.890.600 | 6.007.500 |
| 39 | CILILIN | MUKAPAYUNG | 303.353.000 | 5.378.000 |
| 40 | CILILIN | NANGGERANG | 240.392.600 | 5.564.200 |
| 41 | CILILIN | RANCAPANGGUNG | 252.340.500 | 6.177.600 |
| 42 | CIPATAT | CIPATAT | 294.513.200 | 5.903.100 |
| 43 | CIPATAT | CIPTAHARJA | 380.729.200 | 6.034.000 |
| 44 | CIPATAT | CIRAWAMEKAR | 288.612.400 | 6.007.500 |
| 45 | CIPATAT | CITATAH | 394.018.500 | 7.044.500 |
| 46 | CIPATAT | GUNUNGMASIGIT | 386.447.100 | 5.922.400 |
| 47 | CIPATAT | KERTAMUKTI | 266.470.100 | 5.446.100 |
| 48 | CIPATAT | MANDALASARI | 292.512.500 | 5.378.000 |
| 49 | CIPATAT | MANDALAWANGI | 301.936.500 | 5.378.000 |
| 50 | CIPATAT | NYALINDUNG | 274.934.500 | 8.056.700 |
| 51 | CIPATAT | RAJAMANDALAKULON | 381.113.300 | 5.532.200 |
| 52 | CIPATAT | SARIMUKTI | 275.186.800 | 5.378.000 |
| 53 | CIPATAT | SUMURBANDUNG | 277.969.600 | 5.424.800 |
| 54 | CIPEUNDEUY | BOJONGMEKAR | 289.533.300 | 5.378.000 |
| 55 | CIPEUNDEUY | CIHARASHAS | 296.233.100 | 5.483.300 |
| 56 | CIPEUNDEUY | CIPEUNDEUY | 318.625.800 | 30.982.900 |
| 57 | CIPEUNDEUY | CIROYOM | 320.014.300 | 5.811.600 |
| 58 | CIPEUNDEUY | JATIMEKAR | 284.716.400 | 5.378.000 |
| 59 | CIPEUNDEUY | MARGALAKSANA | 338.157.800 | 5.378.000 |
| 60 | CIPEUNDEUY | MARGALUYU | 244.317.300 | 5.378.000 |
| 61 | CIPEUNDEUY | NANGGELENG | 352.265.100 | 5.378.000 |
| 62 | CIPEUNDEUY | NYENANG | 262.226.500 | 5.378.000 |
| 63 | CIPEUNDEUY | SIRNAGALIH | 242.096.000 | 5.378.000 |
| 64 | CIPEUNDEUY | SIRNARAJA | 324.704.000 | 5.378.000 |
| 65 | CIPEUNDEUY | SUKAHAJI | 271.970.200 | 5.378.000 |
| 66 | CIPONGKOR | BARANANGSIANG | 236.058.500 | 6.316.800 |
| 67 | CIPONGKOR | CIBENDA | 226.832.400 | 5.498.300 |
| 68 | CIPONGKOR | CICANGKANGHILIR | 250.544.500 | 5.378.000 |
| 69 | CIPONGKOR | CIJAMBU | 235.521.900 | 5.378.000 |

| NO | KECAMATAN | DESA | BAGIAN HASIL PAJAK (Rp) | BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp) |
|-----|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 70 | CIPONGKOR | CIJENUK | 252.594.000 | 5.378.000 |
| 71 | CIPONGKOR | CINTAASIH | 240.621.100 | 5.378.000 |
| 72 | CIPONGKOR | CITALEM | 268.288.300 | 5.621.700 |
| 73 | CIPONGKOR | GIRIMUKTI | 246.426.300 | 5.378.000 |
| 74 | CIPONGKOR | KARANGSARI | 255.497.200 | 5.378.000 |
| 75 | CIPONGKOR | MEKARSARI | 238.820.000 | 5.586.000 |
| 76 | CIPONGKOR | NEGLASARI | 240.644.900 | 5.378.000 |
| 77 | CIPONGKOR | SARINAGEN | 248.081.200 | 5.378.000 |
| 78 | CIPONGKOR | SIRNAGALIH | 228.906.400 | 5.378.000 |
| 79 | CIPONGKOR | SUKAMULYA | 243.997.100 | 5.469.000 |
| 80 | CISARUA | CIPADA | 303.197.900 | 5.378.000 |
| 81 | CISARUA | JAMBUDIPA | 468.922.600 | 21.102.500 |
| 82 | CISARUA | KERTAWANGI | 425.081.400 | 9.133.700 |
| 83 | CISARUA | PADAASIH | 566.239.700 | 13.535.900 |
| 84 | CISARUA | PASIRHALANG | 371.334.400 | 6.772.100 |
| 85 | CISARUA | PASIRLANGU | 340.277.300 | 5.903.100 |
| 86 | CISARUA | SADANGMEKAR | 349.063.900 | 6.007.500 |
| 87 | CISARUA | TUGUMUKTI | 310.166.100 | 5.726.800 |
| 88 | GUNUNGHALU | BUNIJAYA | 229.522.900 | 5.378.000 |
| 89 | GUNUNGHALU | CELAK | 228.598.600 | 6.112.000 |
| 90 | GUNUNGHALU | CILANGARI | 247.786.800 | 5.378.000 |
| 91 | GUNUNGHALU | GUNUNGHALU | 242.516.200 | 5.378.000 |
| 92 | GUNUNGHALU | SINDANGJAYA | 243.939.600 | 5.585.800 |
| 93 | GUNUNGHALU | SIRNAJAYA | 228.987.700 | 5.389.300 |
| 94 | GUNUNGHALU | SUKASARI | 226.921.000 | 5.626.200 |
| 95 | GUNUNGHALU | TAMANJAYA | 237.396.700 | 5.378.000 |
| 96 | GUNUNGHALU | WARGASALUYU | 229.076.700 | 5.378.000 |
| 97 | LEMBANG | CIBODAS | 341.794.100 | 5.460.100 |
| 98 | LEMBANG | CIBOGO | 425.045.300 | 7.494.600 |
| 99 | LEMBANG | CIKAHURIPAN | 365.449.300 | 6.380.500 |
| 100 | LEMBANG | CIKIDANG | 324.898.200 | 5.411.900 |
| 101 | LEMBANG | CIKOLE | 403.282.800 | 6.600.400 |
| 102 | LEMBANG | GUDANGKAHURIPAN | 387.344.300 | 13.223.000 |
| 103 | LEMBANG | JAYAGIRI | 526.732.700 | 10.879.200 |
| 104 | LEMBANG | KAYUAMBON | 361.822.100 | 7.688.900 |
| 105 | LEMBANG | LANGENSARI | 467.436.900 | 5.491.200 |
| 106 | LEMBANG | LEMBANG | 471.558.500 | 114.259.200 |
| 107 | LEMBANG | MEKARWANGI | 423.702.200 | 7.371.800 |
| 108 | LEMBANG | PAGERWANGI | 418.919.200 | 5.666.100 |

| NO | KECAMATAN | DESA | BAGIAN HASIL PAJAK (Rp) | BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp) |
|-----|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 109 | LEMBANG | SUKAJAYA | 532.935.900 | 6.772.800 |
| 110 | LEMBANG | SUNTENJAYA | 303.510.600 | 5.439.700 |
| 111 | LEMBANG | WANGUNHARJA | 290.828.100 | 5.934.200 |
| 112 | LEMBANG | WANGUNSARI | 395.592.100 | 5.713.100 |
| 113 | NGAMPRAH | BOJONGKONENG | 338.143.100 | 6.777.300 |
| 114 | NGAMPRAH | CILAME | 1.558.692.900 | 14.241.100 |
| 115 | NGAMPRAH | CIMANGGU | 352.593.000 | 7.543.400 |
| 116 | NGAMPRAH | CIMAREME | 549.343.600 | 47.789.600 |
| 117 | NGAMPRAH | GADOBANGKONG | 503.766.900 | 18.716.600 |
| 118 | NGAMPRAH | MARGAJAYA | 377.070.500 | 8.109.300 |
| 119 | NGAMPRAH | MEKARSARI | 443.576.900 | 6.234.400 |
| 120 | NGAMPRAH | NGAMPRAH | 400.787.900 | 13.137.600 |
| 121 | NGAMPRAH | PAKUHAJI | 419.206.500 | 6.104.300 |
| 122 | NGAMPRAH | SUKATANI | 313.058.200 | 6.313.200 |
| 123 | NGAMPRAH | TANIMULYA | 1.233.832.400 | 14.415.500 |
| 124 | PADALARANG | CAMPAKA MEKAR | 432.861.600 | 5.378.000 |
| 125 | PADALARANG | CIBURUY | 465.227.400 | 5.378.000 |
| 126 | PADALARANG | CIMERANG | 446.412.800 | 5.378.000 |
| 127 | PADALARANG | CIPEUNDEUY | 887.371.400 | 5.378.000 |
| 128 | PADALARANG | JAYAMEKAR | 740.005.900 | 5.378.000 |
| 129 | PADALARANG | KERTAJAYA | 959.243.000 | 5.378.000 |
| 130 | PADALARANG | KERTAMULYA | 716.134.300 | 5.378.000 |
| 131 | PADALARANG | LAKSANAMEKAR | 680.204.500 | 5.378.000 |
| 132 | PADALARANG | PADALARANG | 870.408.500 | 5.378.000 |
| 133 | PADALARANG | TAGOGAPU | 452.454.600 | 5.378.000 |
| 134 | PARONGPONG | CIGUGURGIRANG | 909.435.900 | 10.927.500 |
| 135 | PARONGPONG | CIHANJUANG | 995.729.600 | 8.082.700 |
| 136 | PARONGPONG | CIHANJUANGRAHAYU | 590.919.100 | 16.674.100 |
| 137 | PARONGPONG | CIHIDEUNG | 652.317.100 | 15.182.600 |
| 138 | PARONGPONG | CIWARUGA | 839.674.000 | 15.381.500 |
| 139 | PARONGPONG | KARYAWANGI | 481.029.400 | 12.535.500 |
| 140 | PARONGPONG | SARIWANGI | 1.053.517.200 | 16.070.100 |
| 141 | RONGGA | BOJONG | 251.908.600 | 6.357.100 |
| 142 | RONGGA | BOJONGSALAM | 230.882.100 | 10.124.300 |
| 143 | RONGGA | CIBEDUG | 239.050.200 | 6.906.400 |
| 144 | RONGGA | CIBITUNG | 237.453.100 | 5.746.400 |
| 145 | RONGGA | CICADAS | 232.991.600 | 8.105.700 |
| 146 | RONGGA | CINENGAH | 249.432.900 | 6.014.300 |
| 147 | RONGGA | SUKAMANA | 250.019.700 | 6.555.200 |

| NO | KECAMATAN | DESA | BAGIAN HASIL PAJAK (Rp) | BAGIAN HASIL RETRIBUSI (Rp) |
|-------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 148 | RONGGA | SUKARESMI | 231.029.600 | 6.135.600 |
| 149 | SAGULING | BOJONGHALEUANG | 401.335.600 | 44.713.700 |
| 150 | SAGULING | CIKANDE | 301.380.600 | 6.303.800 |
| 151 | SAGULING | CIPANGERAN | 256.796.200 | 6.277.100 |
| 152 | SAGULING | GIRIMUKTI | 267.092.700 | 5.547.100 |
| 153 | SAGULING | JATI | 641.665.600 | 5.378.000 |
| 154 | SAGULING | SAGULING | 253.003.600 | 6.014.600 |
| 155 | SINDANGKERTA | BUNINAGARA | 232.827.200 | 5.378.000 |
| 156 | SINDANGKERTA | CICANGKANGGIRANG | 244.982.000 | 5.378.000 |
| 157 | SINDANGKERTA | CIKADU | 265.022.300 | 5.378.000 |
| 158 | SINDANGKERTA | CINTAKARYA | 266.328.000 | 6.563.400 |
| 159 | SINDANGKERTA | MEKARWANGI | 279.258.500 | 6.849.400 |
| 160 | SINDANGKERTA | PASIRPOGOR | 233.411.400 | 5.459.800 |
| 161 | SINDANGKERTA | PUNCAKSARI | 268.178.000 | 5.378.000 |
| 162 | SINDANGKERTA | RANCASENGGANG | 241.663.700 | 5.378.000 |
| 163 | SINDANGKERTA | SINDANGKERTA | 245.118.000 | 5.378.000 |
| 164 | SINDANGKERTA | WANGUNSARI | 257.254.000 | 6.380.400 |
| 165 | SINDANGKERTA | WENINGGALIH | 247.044.195 | 5.901.390 |
| Total | | | 61.218.958.095 | 1.478.943.390 |

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR